



LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA**

**PENGADILAN NEGERI
TEMANGGUNG KELAS I B**

TAHUN 2023

(PERIODE JULI - SEPTEMBER)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Survei Indeks Anti Persepsi Korupsi (IPAK) Periode Juli-September Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B.

Laporan Hasil Survei Indeks Anti Persepsi Korupsi (IPK) Periode Juli - September Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban Tim Survei Indeks Anti Persepsi Korupsi (IPAK) Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B dalam rangka pelaksanaan Survei Indeks Anti Persepsi Korupsi (IPAK) yang telah dilakukan pada bulan Juli-September Tahun 2023.

Telah dilaksanakannya Survei Indeks Anti Persepsi Korupsi (IPAK) adalah sebagai wujud komitmen Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Survei Indeks Anti Persepsi Korupsi (IPAK) mempunyai maksud dan tujuan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dan tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Dengan diperolehnya Indeks Anti Persepsi Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B sebesar 3,97 maka diharapkan Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B aktif dalam mensukseskan upaya pencegahan korupsi dengan upaya bersih dalam melayani.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B.



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Temanggung

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.
NIP. 19740321 199903 2 002

Temanggung, 9 Oktober 2023
Ketua Tim,

Monang Sianturi, S.H.
NIP. 19680309 199403 1 003

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator	10
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	199
BAB IV	211
PENUTUP	211
4.1. Kesimpulan	211
4.2. Rekomendasi.....	211
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Temanggung merupakan satuan kerja yang diajukan mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei akan dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Aplikasi SiSUPER.
 - b. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya akan dilakukan export data oleh petugas.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Anti Persepsi Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara

tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Apabila Wakil Ketua tidak ada yang menduduki jabatan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Hakim Senior untuk menjadi pengawas sementara sampai jabatan tersebut terisi kembali.

Wakil Ketua Pengadilan atau Hakim Senior tersebut akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/ penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

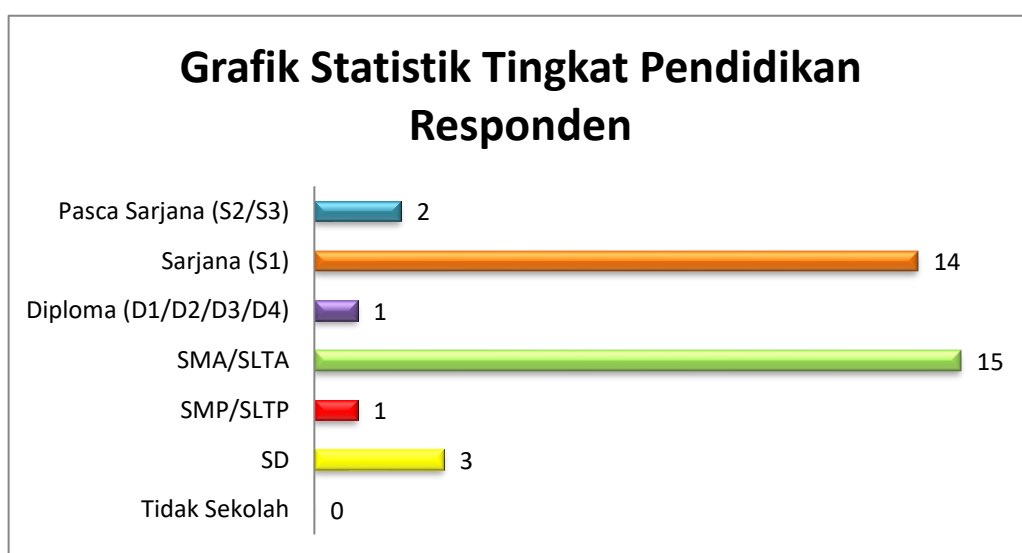
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan pada pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B mayoritas memiliki tingkat pendidikan SMA/SLTA sebesar 42%.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	3	8%
3	SMP	1	3%
4	SMA	15	42%
5	Diploma	1	3%
6	Sarjana	14	39%
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	2	6%
8	Tidak mencantumkan Pendidikan Terakhir	0	0,00%
	Jumlah	36	100,00%

Berikut adalah grafik yang menunjukkan tingkat pendidikan responden pengakses layanan pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B:



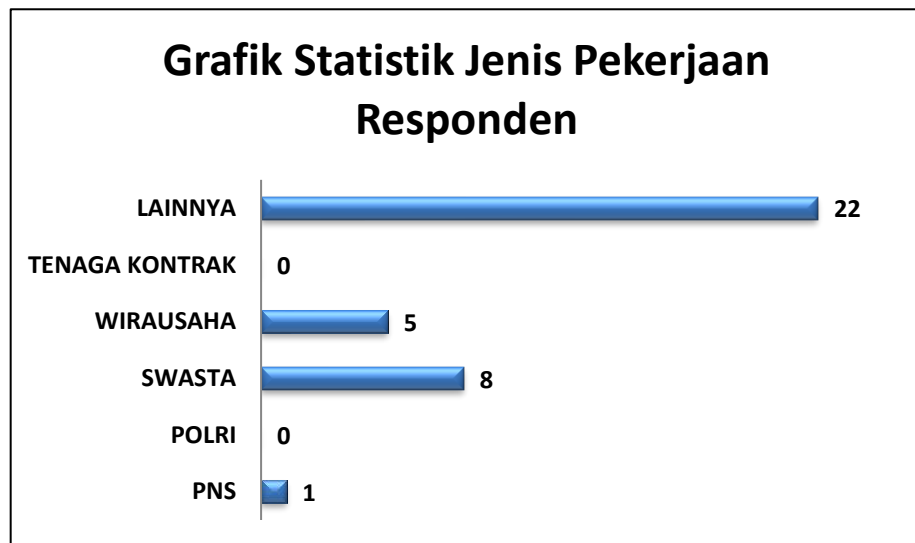
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 3% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB memiliki pekerjaan sebagai PNS, 22% responden bekerja sebagai swasta, 14% responden memiliki pekerjaan sebagai wirausaha, dan 61% responden memiliki pekerjaan sebagai lainnya.

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Presentase
1	PNS	1	3%
2	POLRI	0	0%
3	SWASTA	8	22%
4	WIRAUUSAHA	5	14%
5	TENAGA KONTRAK	0	0%
6	LAINNYA	22	61%
	Jumlah	36	100,00%

Berikut adalah grafik yang menunjukkan jenis pekerjaan responden pengakses layanan pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B:



3.1.3. Kelompok usia responden

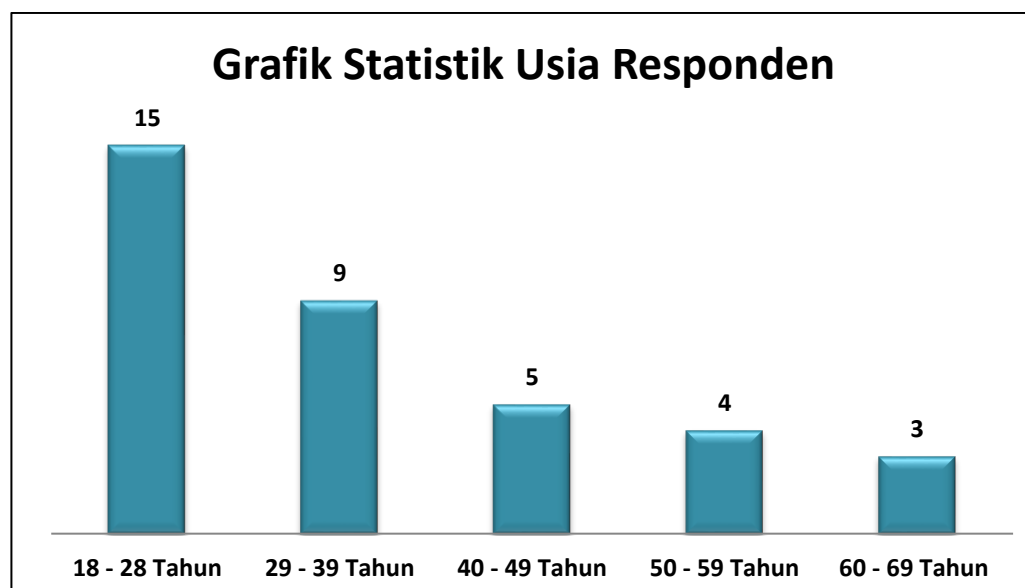
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas

pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun.

Tabel 7.
Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	18 - 28 Th	15	41,67%
2	29 - 39 Th	9	25%
3	40 - 49 Th	5	13,89%
4	50 - 59 Th	4	11,11%
5	60 - 69 Th	3	8,33%
6	Tidak mencantumkan umur	0	0,00%
	Jumlah	36	100,00%

Berikut adalah grafik yang menunjukkan kelompok usia responden pengakses layanan pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB:



3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

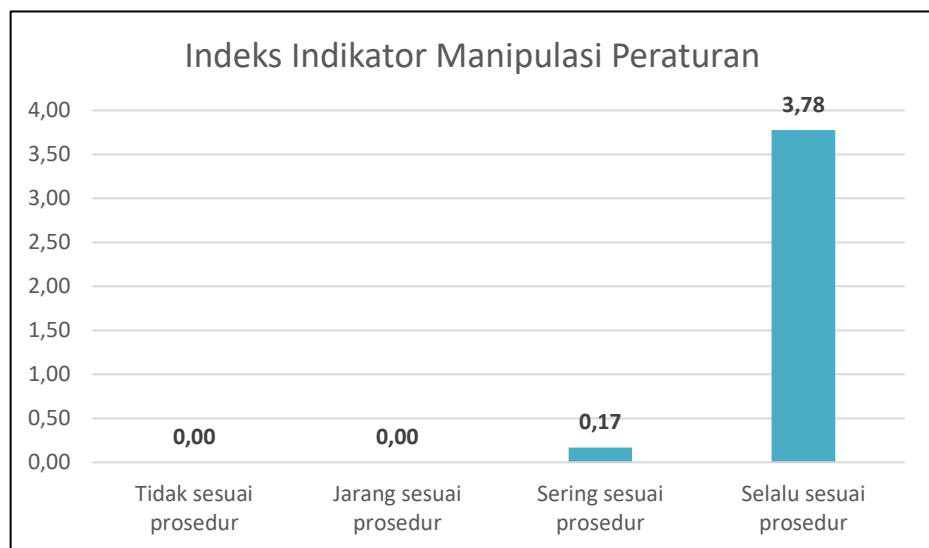
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan menunjukkan hasil pada indeks 3,94. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B bersih dari korupsi.

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Indikator	Jawaban	Jumlah	Nilai X Jumlah Responden	NRR
Tidak sesuai prosedur	1	0	0	0
Jarang sesuai prosedur	2	0	0	0
Sering sesuai prosedur	3	2	6	0,17
Selalu sesuai prosedur	4	34	136	3,78
	Total	36	142	3,94

Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks pada indikator manipulasi peraturan pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B:



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

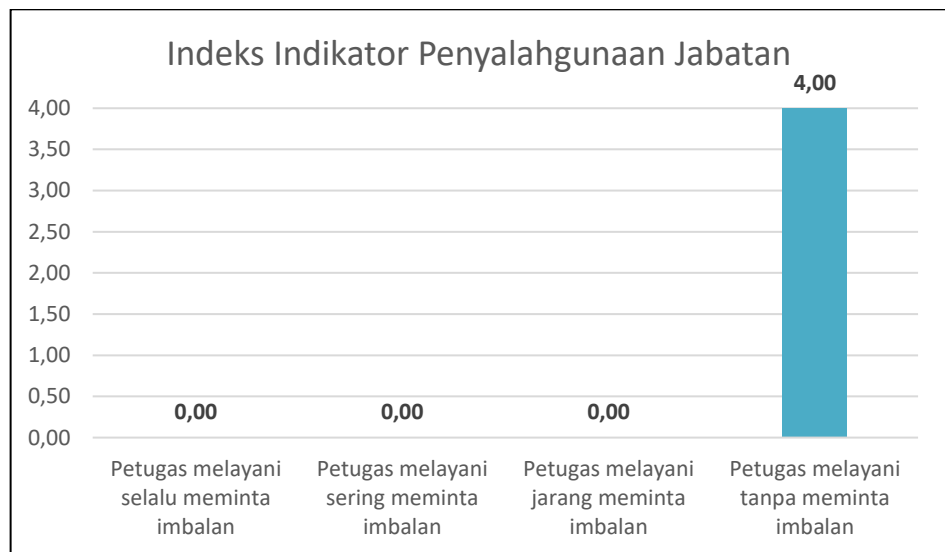
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B bersih dari korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

Indikator	Jawaban	Jumlah	Nilai X Jumlah Responden	NRR
Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0	0,00
Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0	0,00
Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	0	0	0,00
Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	36	144	4,00
Total		36	144	4,00

Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks pada indikator penyalahgunaan jabatan pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B:



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh menunjukkan hasil pada indeks 3,94. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B bersih dari korupsi.

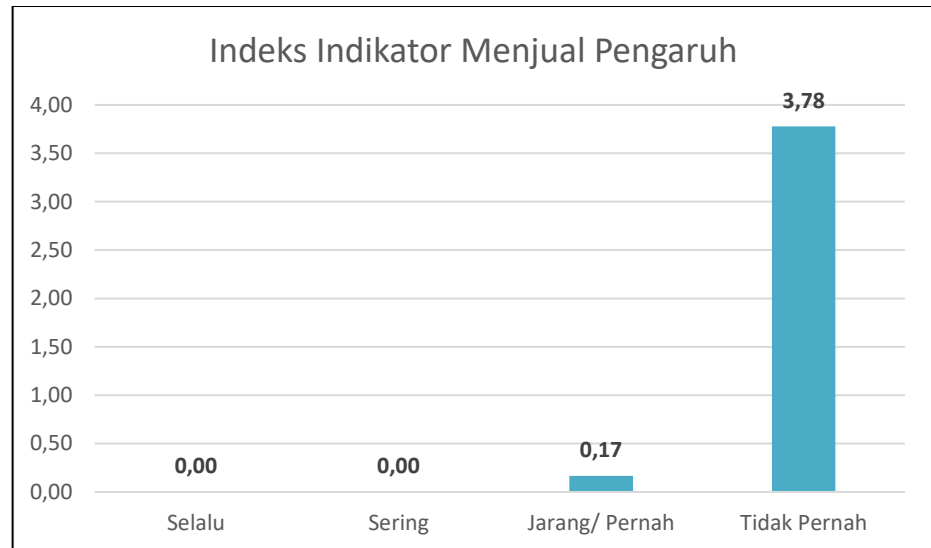
Tabel 11.

Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

Indikator	Jawaban	Jumlah	Nilai X Jumlah Responden	NRR
Selalu	1	0	0	0,00
Sering	2	0	0	0,00

Jarang/ Pernah	3	2	6	0,17
Tidak Pernah	4	34	136	3,78
Total	36	142	3,94	

Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks pada indikator menjual pengaruh di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B:



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

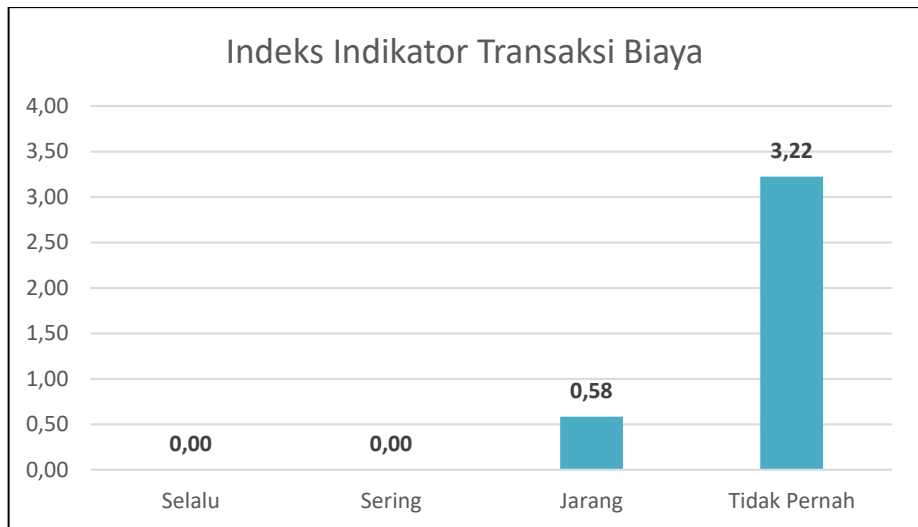
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi biaya menunjukkan hasil pada indeks 3,81. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B bersih dari korupsi.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transaksi biaya

Indikator	Jawaban	Jumlah	Nilai X Jumlah Responden	NRR
Selalu	1	0	0	0,00
Sering	2	0	0	0,00
Jarang	3	7	21	0,58
Tidak Pernah	4	29	116	3,22
Total	36	36	137	3,81

Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks pada indikator transaksi biaya di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B:



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

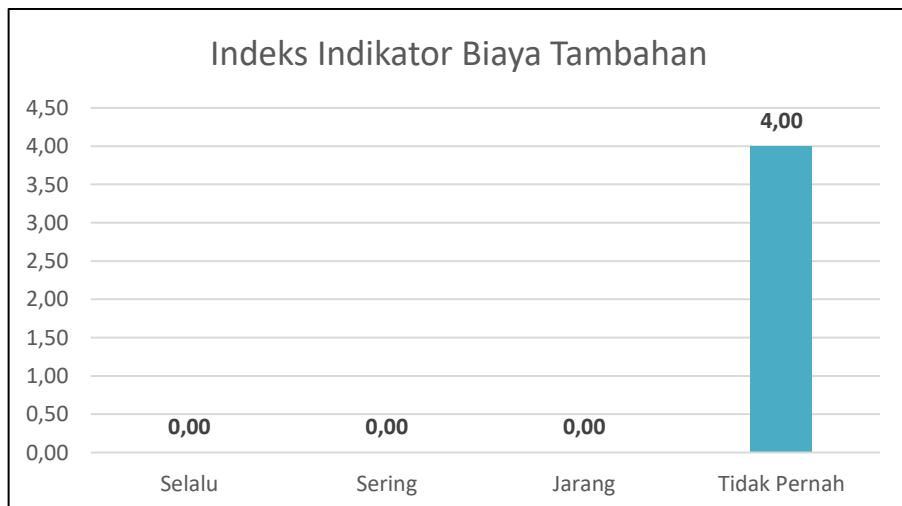
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B bersih dari korupsi.

Tabel 13.

Tabel Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

Indikator	Jawaban	Jumlah	Nilai X Jumlah Responden	NRR
Selalu	1	0	0	0,00
Sering	2	0	0	0,00
Jarang	3	0	0	0,00
Tidak Pernah	4	36	144	4,00
	Total	36	144	4,00

Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks pada indikator biaya tambahan pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B:



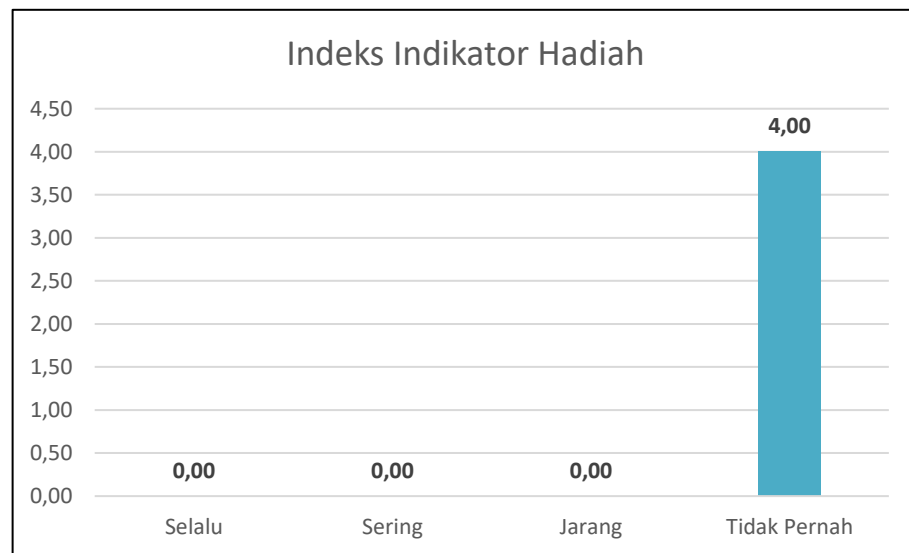
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B bersih dari korupsi.

Indikator	Jawaban	Jumlah	Nilai X Jumlah Responden	NRR
Selalu	1	0	0	0,00
Sering	2	0	0	0,00
Jarang	3	0	0	0,00
Tidak Pernah	4	36	144	4,00
	Total	36	144	4,00

Tabel 14.
Indeks Pada Indikator Hadiah

Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks pada indikator hadiah di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB:



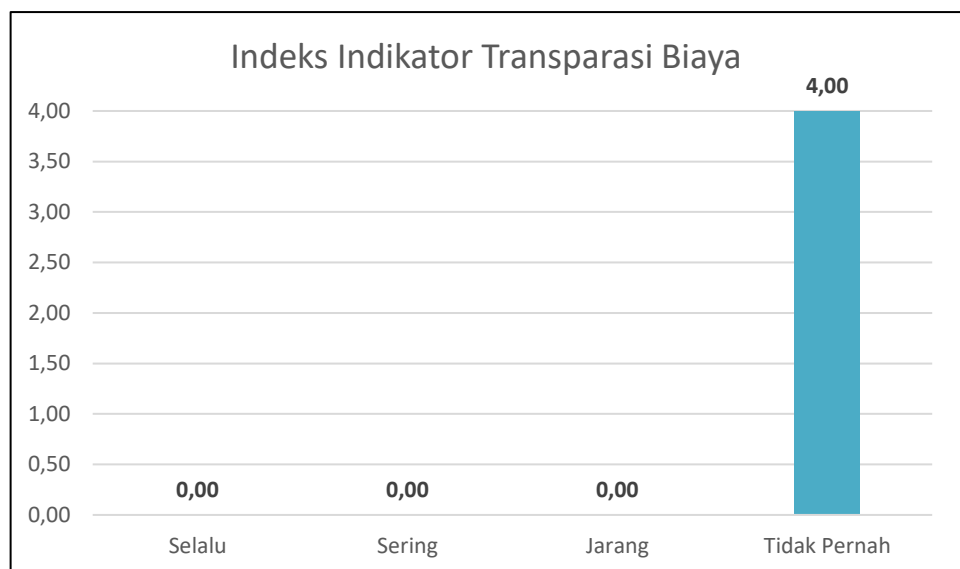
3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B bersih dari korupsi.

Indikator	Jawaban	Jumlah	Nilai X Jumlah Responden	NRR
Selalu	1	0	0	0,00
Sering	2	0	0	0,00
Jarang	3	0	0	0,00
Tidak Pernah	4	36	144	4,00
	Total	36	144	4,00

Tabel 15.
Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks pada indikator transparansi biaya pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B:



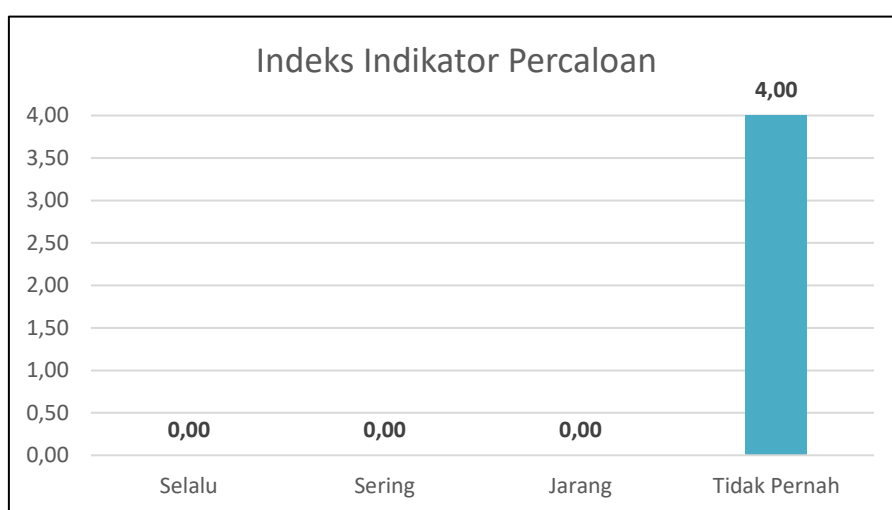
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B bersih dari korupsi.

Tabel 16.**Indeks Pada Indikator Percaloan**

Indikator	Jawaban	Jumlah	Nilai X Jumlah Responden	NRR
Selalu	1	0	0	0,00
Sering	2	0	0	0,00
Jarang	3	0	0	0,00
Tidak Pernah	4	36	144	4,00
	Total	36	144	4,00

Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks pada indikator percaloan pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB:

**3.2.9. Indikator Perbuatan Curang**

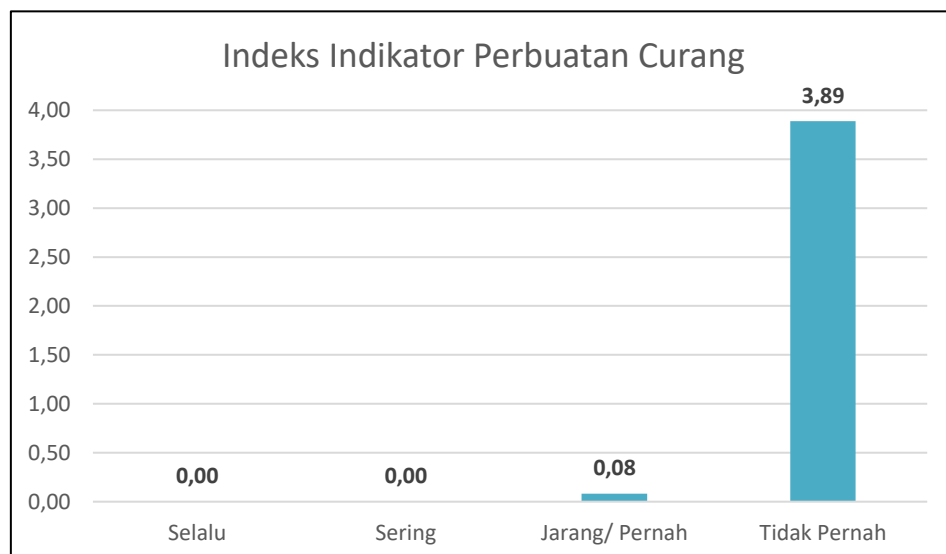
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang menunjukkan hasil pada indeks 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B bersih dari korupsi.

Tabel 17.**Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang**

Indikator	Jawaban	Jumlah	Nilai X Jumlah Responden	NRR
Selalu	1	0	0	0,00
Sering	2	0	0	0,00
Jarang/ Pernah	3	1	3	0,08
Tidak Pernah	4	35	140	3,89
	Total	36	143	3,97

Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks pada indikator perbuatan curang pada Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas I B:



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

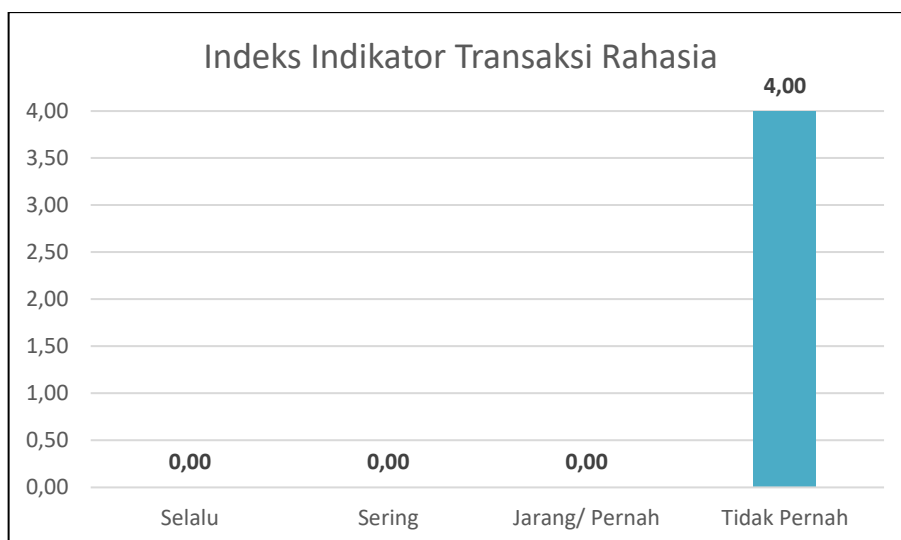
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B bersih dari korupsi.

Tabel 18.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

Indikator	Jawaban	Jumlah	Nilai X Jumlah Responden	NRR
Selalu	1	0	0	0,00
Sering	2	0	0	0,00
Jarang/ Pernah	3	0	0	0,00
Tidak Pernah	4	36	144	4,00
	Total	36	144	4,00

Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks pada indikator transaksi rahasia pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B:



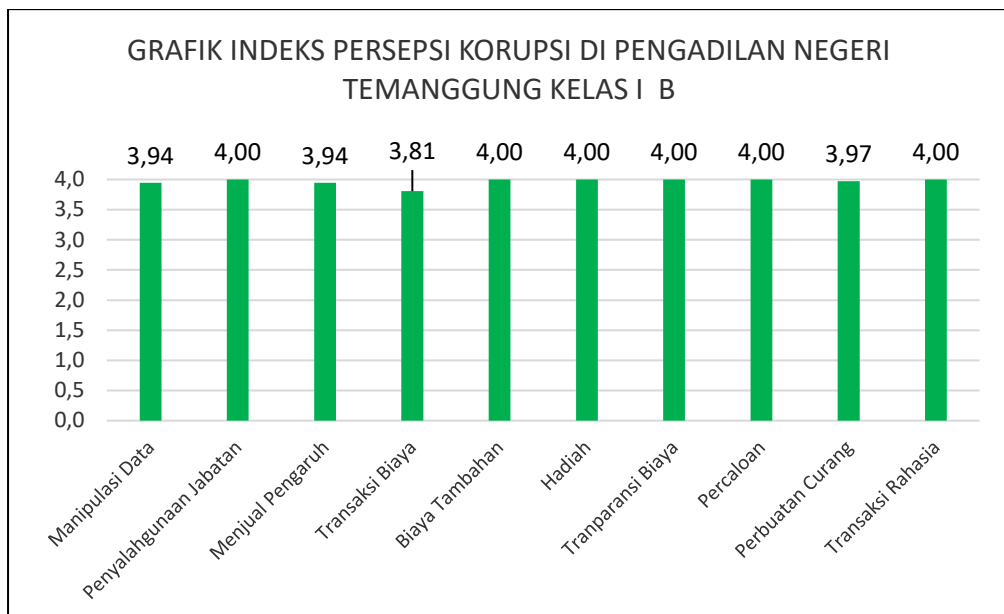
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Temanggung sebesar 3,97.

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Q1-Q3	INDIKATOR	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Data	3,94
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
Q 3	Menjual Pengaruh	3,94
Q 4	Transaksi Biaya	3,81
Q 5	Biaya Tambahan	4,00
Q 6	Hadiah	4,00
Q 7	Tranparansi Biaya	4,00
Q 8	Percaloan	4,00
Q 9	Perbuatan Curang	3,97
Q 10	Transaksi Rahasia	4,00
	IPK (Indeks Persepsi Korupsi)	3,97

Berikut adalah grafik yang menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi satuan kerja pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B:



Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,97 / 99,17 % tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka **81.26 – 100.00**.

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja
Pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB memiliki **Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,97** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,94
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,94
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,81
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,97
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B Periode Juli-September Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 4,00 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 indikator terendah yaitu indikator “Transaksi Biaya” sebesar 3,81, indikator “Manipulasi Data” 3,94 dan indikator “Menjual Pengaruh” 3,94. Unsur tertinggi ada pada 6 indikator yaitu indikator “Penyalahgunaan Jabatan” 4,00, indikator “Hadiah” 4,00, indikator “Biaya Tambahan” 4,00, indikator “Transparansi Biaya” 4,00, indikator “Percaloan” 4,00, dan indikator “Transaksi Rahasia” 4,00.

LAMPIRAN-LAMPIRAN